



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR NAISJAH**
2. Jabatan : **LURAH TEMANGGUNG II**
3. NHK : **729762**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **740.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 507 m²/70 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 199 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m²/21 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 1510 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **129.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 117.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X / NF 100 D Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 28D MIO AL 115S A/T CW Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, SUZUKI UD 110 EE / SPM SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **8.500.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **15.000.000**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**

Sub Total

Rp. **892.500.000**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

892.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.